

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
(APBDes) TAHUN 2015 DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

OLEH

Mauliyanna M. Amin/ 1301156488

(mauliyana20@gmail.com)

Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

This study aims to determine the Effectiveness of Revenue Budget Expenditure Belanjd Village (APBDes) Year 2015 In Sengkilo Island Village District Kelayang Indragiri Hulu. The theory concepts that researchers use are organizational effectiveness by using Gibson's theory by looking at Clarity of purpose to be achieved, Clarity of goal achievement strategy, Mature Planning, Preparation of appropriate program, and System of supervision and control that educate. The research method used is qualitative research with descriptive data assessment. In data collection, the researcher uses interview, observation, and documentation technique based on Purposive sampling.

From the research results show that the Effectiveness of the Use of Revenue Expenditure Budget Village (APBDes) Year 2015 In the Village District Kelayang Indragiri Hulu not effective it appears there are shortcomings, there are many facilities and infrastructure that is not good and there are many programs of community empowerment and development that has not run . The factors that affect the Effectiveness of the Use of Revenue Expenditure Budget Village (APBDes) Year 2015 In the Village of Sengkilo Island Kelayang Sub-district Indragiri Hulu Regency is the Quality of Human Resources and Coordination that has not been good.

Keywords: Effectiveness, Implementation, Budget of Village Expenditure (APBDes)

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam era demokratis, globalisasi terlebih dalam era reformasi. Bangsa dan negara Indonesia menumbuhkan manusia-manusia bermental pembangunan yang berkualitas. Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberikan peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya, dengan demikian otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi. Persoalan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan masalah yang paling ramai dibicarakan di negeri ini.

Tujuan yang hendak dicapai dari pemberian otonomi daerah adalah: “terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab” otonomi yang nyata berarti bahwa pemberian otonomi kepada daerah adalah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan, dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan untuk mengurus rumah tangga di daerahnya.

Sedangkan otonomi yang dinamis berarti pemberian otonomi kepada daerah yang didasarkan pada situasi, kondisi dan perkembangan pembangunan. Selanjutnya pengertian otonomi yang bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu memperlancar pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air tanpa ada pertentangan antara kebijaksanaan yang diberikan oleh pemerintah daerah serta pelaksanaan operasional yang dilaksanakan oleh daerah penerima otonomi, sehingga pembangunan daerah merupakan rangkaian pembangunan nasional secara menyeluruh.

Desa sebagai sebuah kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan desa, pemilihan kepala desa serta proses

pembangunan desa. Berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, otonomi desa semakin luas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada didesa baik dibidang ekonomi, politik, sosial budaya dan lingkungan dan mempercepat pembangunan desa dalam rangka mempercepat kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Alokasi anggaran yang berasal dari APBN, bersumber dari Belanja Pusat dan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, yang di dalam penjelasan pasal dijelaskan bahwa besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran tersebut dihitung berdasarkan jumlah Desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

Pengaturan tentang keuangan Desa dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jelas telah memberikan ruang yang sangat besar terhadap upaya peningkatan pembangunan ekonomi desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Tantangan yang muncul justru dari pengelolaan keuangan yang menuntut pengelolaan keuangan yang memiliki akuntabilitas dan transparansi agar dukungan keuangan dari pemerintah ini dapat meningkatkan sektor ekonomi dalam pembangunan Desa.

Agar pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, maka perlu dirumuskan suatu Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Desa Pulau Sengkilo adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Desa Pulau

Sengkilo merupakan desa yang diberikan wewenang untuk melaksanakan otonomi desa. Sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu mengeluarkan Kebijakan anggaran tentang APBDes yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa, porsi penerimaan APBDes setiap tahun berbeda, Sesuai dengan kebijakan pemerintahan kabupaten itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dikemukakan penulis sebagai berikut :

- a. Bagaimana efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu?

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Penggunaan Anggaran

Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Administrasi Negara dalam kajian.

- b. Untuk menguatkan dan menghubungkan fenomena-

fenomena yang ada dilapangan dengan teori-teori yang ada. Dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah desa pulau sengkilo atas kerja pelaksanaan APBDes dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, dan melakukan perbaikan untuk hal-hal yang dianggap perlu mendapat perhatian khusus.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintahan.

1.4 Konsep Teori

1.4.1 Efektivitas

Efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan-kebaikan untuk memperoleh masukan tentang efektivitas. Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya.

Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas, menurut **Steers** dan **Sutrisno (2011:123)**, pada umumnya efektivitas hanya berkaitan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Dalam penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia seharusnya selalu muncul menjadi fokus primer dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas seharusnya selalu dimulai dengan meneliti perilaku manusia di tempat kerja.

Sumaryadi (2005:105) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat diartikan apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.

Gibson dalam **Pasolong (2011:4)** mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas.

Sedangkan menurut **Supriyono (2000:29)** efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pada unit tersebut.

1.4.5 Administrasi Keuangan

Tujuan yang ingin dicapai oleh administrasi keuangan negara adalah pertanggung jawaban, efisiensi, dan efektivitas dalam pengadaan serta penggunaan dana. Ruang lingkup pembahasan administrasi keuangan tergantung dari sudut pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang berbeda akan mencerminkan ruang lingkup yang berbeda.

Pembahasan administrasi keuangan dikelompokkan kedalam 5 pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan ketatalaksanaan keuangan, pendekatan keuangan negara, pendekatan administrasi negara termasuk administrasi pembangunan, pendekatan sejarah perkembangan sistem anggaran, pendekatan organisasi sebagai sistem terbuka.

Administrasi keuangan menyangkut lima segi kebijaksanaan nasional yang terpisah-pisah **Allen D. Manvel dalam Abdullah (2002:6)** yaitu :

- a) kebijaksanaan ekonomi, menyangkut hubungan antara pengeluaran pemerintah dan semua pendapatan lainnya.
- b) kebijaksanaan utang (bagaimana pemerintah mengadakan dan membayar kembali utang-utang)
- c) kebijaksanaan pendapatan (menentukan besarnya secara relatif dari berbagai sumber penerimaan serta persoalan pajak-pajak yang harus dikenakan).
- d) kebijakan pengeluaran.
- e) kebijakan pelaksanaan.

1.4.6 Keuangan Negara

menurut **Atmaja (2005:24)** ada 3 interpretasi mengenai pengertian keuangan negara yaitu:

- a) keuangan negara adalah semua aspek yang mencakup dalam APBN yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR setiap tahunnya. Dengan kata lain APBN merupakan deskripsi keuangan negara dalam arti sempit, sehingga pengawasan terhadap APBN juga merupakan pengawasan terhadap keuangan negara.
- b) berkaitan dengan metode dogmatis dan resrtiktif yang diungkapkan sebelumnya, bahwa pengertian keuangan negara dijelaskan dalam arti luas yaitu dengan segala kegiatan atau aktifitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik.
- c) pengertian keuangan negara dalam arti luas, yakni termasuk didalamnya, keuangan yang berada dalam APBN, APBD, BUMN/D dan para hakikatnya seluruh kekayaan negara

yang merupakan objek pemeriksaan dan pengawasan. Pengertian ini berdasarkan pada penafsiran sistematis dan teologis untuk mengetahui sistem pengawasan dan pemeriksaan pertanggung jawaban.

1.4.7 Keuangan Daerah

Menurut **abdul halim (2007:18)** akuntansi keuangan daerah mengartikan sebagai berikut : “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan-perundangan yang berlaku” dari definisi diatas terdapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu :

- a) yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan.
- b) yang dimaksudkan kewajiban adalah untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan kepada daerah dalam menjalankan fungsi.

Reformasi keuangan daerah dapat dikatakan merupakan peluang terbesar sekaligus ancaman yang diperoleh pemerintah daerah dan DPRD, untuk menunjukkan kemampuan menggali dan mengelola anggaran daerah tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah pusat.

Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah. pendapatan asli daerah sampai saat ini merupakan sektor yang sangat diharapkan dan diandalkan oleh pemerintah daerah.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikerluarkannya undang-undang tentang otonomi daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antara daerah satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain **Natluddin (2001:167)**.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan memahami fenomena-fenomena yang ada di lapangan yang dialami oleh subjek peneliti misalnya kondisi masyarakat, kondisi pembangunan, perilaku, tindakan, motivasi dan lain-lain dengan cara deskriptif dalam bentuk bahasa dan kata-kata, pada suatu konteks yang alamiah. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015 di Desa Pulau**

Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa pulau sengkilo kecamatan kelayang kabupaten Indragiri hulu. Sesuai dengan judul yang dibuat oleh peneliti, peneliti memilih lokasi tersebut karena terlihat jelas dari fenomena yang ada bahwa di desa pulau sengkilo masih terdapat banyak masyarakat yang kurang mampu dan masih banyak pembangunan yang kurang baik. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul tentang Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

1.7.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Disini peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, yang menjadi subyek penelitian (informan) adalah mereka yang dianggap dapat memberikan informasi yang memadai berkaitan dengan pernyataan penelitian ini. Oleh karena itu, terdapat beberapa subjek penelitian yang sengaja dipilih dan ditentukan si peneliti sebagai sumber data, informan yaitu orang yang dianggap paling mengerti berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Kasi Pemerintahan
- c. Masyarakat.

A. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian **Sugiono (2011:137)**. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan informan dan pihak-

pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara, serta pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi sehubungan dengan Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

2. data sekunder

Data sekunder yaitu, data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui laporan-laporan, buku-buku, atau data yang telah diolah, seperti data yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk surat kabar, majalah, maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. **Sugiono (2011:137)**

Data yang penulis peroleh saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Laporan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) tahun 2015
- b. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung ditempat penelitian untuk mengetahui objek yang akan diteliti. Guna untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas Penggunaan Anggaran

Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara langsung dan mengajukan pertanyaan kepada informan yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.

1.7.5 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data ini diperlukan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data, penulis mengambil teknik triangulasi dengan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat dengan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi secara umum merupakan kegiatan check, re-check dan crosscheck antara data dengan observasi penelitian dilapangan, yang selanjutnya hasil observasi ini dilakukan crosscheck melalui persepsi penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Tahun 2015 Di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berdasarkan pengamatan dan wawancara mendalam tentang efektivitas pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Didalam penelitian ini penulis mengamati tentang pelaksanaan penggunaan dana APBDes yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Di dalam Penggunaan dana APBDes diperjelaskan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam pelaksanaan dan penggunaan dana APBDes dimaksudkan sebagai upaya yang mendukung dan mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik agar segala proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa baik secara fisik maupun non-fisik dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah. Penggunaan dana APBDes sesuai dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa yaitu dibagi menjadi 2 bagian yaitu 30% (tiga puluh persen) biaya operasional sedangkan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah Desa.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Gibson dalam Sumaryadi (2005:107). Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif

dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan. Gibson mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur yaitu :

3.1.1 Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai merupakan aspek yang paling mendasar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan penggunaan dana APBDes. Tujuan yang ingin dicapai, hendaklah memperhatikan pedoman dari pengelolaan dana APBDes yang dimulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan dari APBDes tersebut. Dari hasil wawancara dengan Seketaris Desa sebagai berikut:

“Menurut saya tujuan dari penggunaan dana APBDes ini dapat membantu meningkatkan segala proses kegiatan baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa dan kesejahteraan masyarakat diantaranya fasilitas umum seperti sekolah, kantor desa, jalan dll. Hal ini dilakukan sesuai dengan perencanaannya yang sudah dimusyawarahkan dengan kesepakatan bersama pada Musrenbang Desa untuk membahas rencana penggunaan dana yang akan disusun didalam APBDes”. **(Wawancara dengan Bapak Suhaidi Sekretaris Desa Pulau Sengkilo, 30 Mei 2017)**

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana APBDes di Desa Pulau Sengkilo bertujuan membantu meningkatkan kegiatan program baik secara fisik maupun non-fisik yang ada di desa termasuk belanja desa yang telah ditetapkan dalam APBDes yang digunakan sesuai dengan yang tertuang didalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa

yang menjelaskan bahwa penggunaan Dana Desa dibagi menjadi 2 yaitu 30% digunakan untuk pembiayaan operasional aparatur pemerintah desa dan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

3.1.2 Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Dalam pencapaian tujuan kejelasan strategi yang hendak dicapai sangat penting dalam upaya pelaksanaan penggunaan dana APBDes. Tujuan dari strategi untuk pedoman sekaligus mengoptimalkan kegiatan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa kedepannya dengan melihat potensi apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang untuk kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dalam merancang strategi yang hendak dicapai tidak terlepas dari pihak-pihak desa agar terciptanya suatu keberhasilan yang diinginkan. Kejelasan strategi dipandang sebagai hal yang sangat penting dalam upaya pelaksanaan penggunaan dalam upaya pembangunan desa. Strategi merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan dan meningkatkan program kegiatan infrastruktur di pemerintah desa.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris desa sebagai berikut :

“Menurut saya selaku sekretaris desa memiliki strategi dalam pelaksanaan penggunaan dana APBDes di Pulau Sengkilo ada beberapa hal penting yang menjadi prioritasnya seperti menjadikan dokumen RPJM Desa ini sebagai satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan desa 6 (enam) tahun, bekerjasama membangun desa dengan keadilan, partisipatif, transparan, bertanggung jawab serta melakukan pengawasan terhadap proses-proses pembangunan desa, pemanfaatan, pelestarian kegiatan, memberikan penghargaan dan sanksi proporsional. **(Wawancara dengan Bapak Suhaidi Sekretaris Desa, 30 Mei 2017)**

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana

APBDes, strategi pemerintah desa dilakukan dari selama 6 tahun yang disusun didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMdesa) untuk mencapai tujuan dan strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa Pulau Sengkilo, kemudian merumuskan kembali dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa yang dirumuskan setiap 1 tahun anggaran yang disahkan melalui surat keputusan kepala Desa Pulau Sengkilo. Dan fasilitator kecamatan juga memberikan arahan kepada Pemerintah Desa Pulau Sengkilo agar dapat menyusun program kegiatan disesuaikan dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

3.1.3 Perencanaan yang matang

Dalam pelaksanaan penggunaan dana APBDes Desa Pulau Sengkilo mempunyai tugas untuk menjalankan dalam tahapan awal ini yaitu adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat seperti beberapa anggota pemerintah desa yaitu anggota BPD, anggota LPMD, Kasi Pemerintahan Kecamatan Kelayang, dan melibatkan masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pulau Sengkilo sebagai berikut :

“Menurut saya perencanaan pelaksanaan penggunaan dana APBDes di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang telah dilakukan dengan baik, Perencanaan ini dilakukan dengan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdesa) pada awal tahun bulan januari. Kami juga mengajak semua perangkat desa mulai dari Kepala Desa, BPD, Anggota LPMD, Dan dari kecamatan seperti Fasilitator kecamatan dan juga masyarakat” **(Wawancara dengan Bapak Suhaidi Sekretaris Desa Pulau Sengkilo, 30 Mei 2017)**

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa dalam membuat perencanaan yang

matang dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbang desa adalah forum pembahahasan yang akan menampung usulan, arahan, kritikan yang membahas program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan kedepannya. forum pembahahasan ini adalah forum yang merencanakan kegiatan pembangunan ditingkat desa yang berpedoman pada Prinsip Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD).

3.1.4 Penyusunan program yang tepat

Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan tidak akan terlepas dari program apa yang tepat yang akan dijalankan kedepannya dalam pelaksanaan penggunaan dana APBDes. Penyusunan program yang tepat tujuannya agar mencapai target sasaran yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan oleh masyarakat desa dan pemerintah desa. Untuk mewujudkan kebijakan dan strategi yang telah dibuat oleh pemerintah desa telah dibuat program-program yang berupaya mewujudkan dari tujuan APBDes.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa sebagai berikut:

“Saat ini pemerintah desa memiliki program-program melalui Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP), Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) program-program ini disesuaikan berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Pulau Sengkilo. Pada tahun 2015 program yang sudah terealisasi yaitu semenisasi jalan dan dermaga penyeberangan atau kompong. Kami sudah menyiapkan program-program yang akan dilaksanakan seperti program ekonomi kerakyatan yang produktif, program dana bergulir, agribisnis, dan manajemen usaha, program pengelolaan tata ruang desa, program pemberdayaan lembaga adat , program kualitas dan perumahan”. **(Wawancara dengan Bapak**

Suhaidi Sekretaris Desa Pulau Sengkilo 30 Mei 2017)

Dari wawancara diatas dapat diketahui program pemerintah desa yang dijalankan sudah sepenuhnya berhasil, program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa seperti semenisasi dan dermaga penyeberangan atau kompong. Untuk program pemberdayaan masyarakat desa belum berjalan secara maksimal sesuai berdasarkan Peraturan Desa Pulau Sengkilo.

3.1.5 Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik

Salah satu fungsi pengawasan sebagai suatu pengendalian manajemen yang bebas dalam menyelesaikan tanggung jawab secara efektif, jadi fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Dalam pelaksanaan penggunaan dana APBDes di Desa Pulau Sengkilo diawasi oleh BPD dan Inspektorat Kabupaten, dilihat dari hasil wawancara dengan sekretaris desa sebagai berikut :

“Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan dana APBDes diawasi oleh BPD, kasi pemerintahan kecamatan dan dan juga melibatkan masyarakat Desa Pulau Sengkilo, kemudian baru diaudit oleh inspektorat tingkat kabupaten atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)”

(Wawancara dengan Bapak Suhaidi Sekretaris Desa Pulau Sengkilo, 30 Mei 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa dalam melakukan pengawasan sangat diperlukan kerja sama

dari anggota BPD, pihak kecamatan dengan pihak inspektorat untuk melihat dan memantau proses pelaksanaan penggunaan Dana APBDes dalam proses program kegiatan pembangunan. Inspektorat bertugas untuk mengawasi dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana APBDes seperti semua anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan dana APBDes. Tujuan dari pengawasan dan pengendalian tersebut bertujuan yaitu untuk mengetahui setiap perkembangan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan penggunaan Dana APBDes apakah sudah terlaksana dengan baik.

3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Dana APBDes Di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Didalam suatu organisasi banyak terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu organisasi tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang positif penulis melakukan serangkaian kegiatan berupa observasi dan wawancara, maka penulis akan menjabarkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan dana APBDes Di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu yang peneliti temukan di lapangan adalah sebagai berikut :

3.2.1 Kualitas Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah suatu potensi yang ada pada suatu individu. Dalam suatu organisasi sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh suatu organisasi. Begitu juga dengan sumber daya manusia dari aktor pelaksana penggunaan dana APBDes Di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Terkait dengan kemampuan sumber daya manusia perangkat desa sebagai pelaksana

penggunaan dana APBDes Desa Pulau Sengkilo.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa sebagai berikut :

“Memang pendidikan dari para pelaksana penggunaan dana APBDes sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan APBDes. Rata-rata perangkat desa pendidikan terakhir SMA/sederajat sehingga kesulitan dalam penyusunan SPJ yang baik untuk pencairan berikutnya, meskipun demikian dengan kemampuan dan hasil seadanya kami mampu selesaikan, dan sebagian aparatur kami sebagian besar tidak memahami dalam mengoperasikan komputer sehingga memperlambat kami dalam penyusunan SPJ. yaa walaupun ujung-ujungnya dapat kami selesaikan”. **(Wawancara dengan bapak Suhaidi Sekretaris Desa Pulau Sengkilo, 30 Mei 2017)**

Dari hasil wawancara diatas juga dilatarbelakangi kurang kemampuan beberapa pemerintah desa dalam mengoperasikan komputer, sehingga mereka mengalami hambatan dalam menyusun Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) dan minimnya kualitas sumber daya manusia aparat desa. Hal ini merupakan faktor internal yang datang dari pemerintah desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini dapat dilihat dari tabel tingkat pendidikan pemerintah Desa Pulau Sengkilo, yaitu sebagai berikut :

3.2.2 Koordinasi yang kurang baik

Koordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan Pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Demi tercapainya tujuan organisasi dimana

koordinasi mengelompokkan, mengumpulkan dan perhimpunan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

Koordinasi perlu dilakukan antar pelaksana program APBDes di Desa Pulau Sengkilo, agar terjalin koordinasi antar pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Para pelaksana koordinasi harus mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab agar nantinya tercipta tujuan yang hendak dicapai.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa sebagai berikut :

“Koordinasi antara pemerintah kabupaten ke pemerintah masih kurang dalam hal ini terlihat pemerintah kabupaten dalam memberikan sosialisasi penggunaan dana APBDes”. **(Wawancara dengan Bapak Suhaidi Sekretaris Desa Pulau Sengkilo, 30 Mei 2017)**

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa adanya koordinasi yang kurang baik terhadap instansi yang terkait yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, dan Pihak desa dengan Pemerintah Kecamatan sehingga menghambat proses pelaksanaan program-program desa.

3.2.3 Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Mengenai partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dapat di lihat dalam berbagai tahap yang meliputi :

a. Partisipasi masyarakat dalam proses

pembuatan keputusan

Tahap perencanaan penggunaan dana APBDes melalui musyawarah tingkat desa. Dalam musyawarah ini pemerintah desa melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari RT, RW, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, PKK, Karang Taruna, LPM, Kepala Desa, beserta perangkatnya hingga BPD, partisipasi masyarakat Desa Pulau

Sengkilo dalam membuat keputusan sangat kurang, karena masyarakat banyak yang ingin ikut campur dalam urusan kebijakan pemerintah, padahal kebijakan ini untuk membantu masyarakat terutama dalam memperoleh kebutuhan hidup dalam sehari-hari.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Peran serta masyarakat dalam penggunaan dana APBDes mengacu pada kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah desa yang akan di danai dari APBDes. Masyarakat tidak begitu aktif dalam pelaksanaan APBDes ini di sebabkan bahwa mereka lebih mementingkan mencari kebutuhan sehari-hari. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan APBDes ini sangat kurang, sekalipun ada yang aktif.

c. Partisipasi dalam memanfaatkan

hasil

Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil dari pembangunan yang bersumber dari dana APBDes masyarakat Desa Pulau Sengkilo dapat menikmati dari hasil pembangunan yang telah dibuat. Namun dalam pemanfaatan hasil dari pelaksanaan dana APBDes ini, masyarakat ikut tetapi dalam pengasuhannya atau menjaga kondisi pembangunannya sangat sedikit masyarakat yang ikut agar terlaksananya pemanfaatan dana APBDes yang sesuai dengan keinginan masyarakat banyak.

d. Partisipasi dalam evaluasi

Masyarakat diberikan kesempatan untuk menilai baik dan buruknya hasil pembangunan yang telah dicapai. Masukan dapat disampaikan

dalam musyawarah desa baik oleh masyarakat secara langsung maupun melalui BPD selaku institusi perwakilan masyarakat. partisipasi masyarakat dalam evaluasi program ini sangat efektif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis tentang Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, Serta faktor-faktor yang mempengaruhi, maka dalam bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian serta sasaran bagi pihak yang berkepentingan dan terkait yaitu pemerintah Desa Pulau Sengkilo dan Masyarakat.

1. Efektivitas Penggunaan Anggaran

Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Tahun 2015 Di Desa Pulau Sengkilo

Kecamatan Kelayang Kabupaten

Indragiri Hulu belum efektif hal ini

terlihat terdapat kekurangan, masih

banyak program yang belum terlaksana

dengan baik terlihat masih banyak

jalan-jalan yang rusak dan juga

masih banyak masyarakat yang kurang

mampu, terutama masyarakat lansia.

2. Terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi Efektivitas Penggunaan

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang kabupaten Indragiri Hulu yaitu :

- a. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) ini adalah kemampuan aparatur desa dalam mengatur dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk setahun ke depannya maupun dalam penyusunan laporan Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) masih berkurang karena aparatur desa masih kurang memahami dan kurang mengerti dalam menginput data pemasukan dan pengeluaran.
- b. Koordinasi antara pemerintah kabupaten ke pemerintah masih kurang dalam hal ini terlihat pemerintah kabupaten dalam

memberikan sosialisasi penggunaan dana APBDes.

4.2 Saran

Pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) memiliki peranan penting untuk menyikapi kondisi fisik maupun non-fisik dilingkungan Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Dari penelitian yang telah penulis lakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun serta dapat dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah desa terkait dalam Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

1. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurrahmat. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo
- Akbar. 2002. *Fungsi Manajemen keuangan Daerah*. Majalah Pemeriksa Edisi No.87
- Albert. 2002. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Penebar Swadaya.
- Hakim, Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Ar-Ruzz media: Yogyakarta.
- Hasibua, Melayu, SP. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi 2. Yogyakarta: UPPST IM YKPN
- Mamesah.1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nataluddin, dkk. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*. Bandung: Mundar Maju

Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama

Supriyono, R.A. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE

Dokumen Lainnya:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa

Karya Ilmiah

Hayati, Sri. 2012. Efektivitas Tim Sar Dalam Pencarian Dan Pertolongan Korban Bencana Dan Musibah Di Riau. Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara. FISIP : Universitas Riau.